No.	Nomor Peraturan	Tanggal	Tentang
1	10/MK/BC/2025	3-Nov-25	Barang yang Dibatasi untuk Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tah 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
2	PER-19/PJ/2025	22-Oct-25	Penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap PKP yg tidak melaksanakan kewajiban sesuai dgn ketentuan peratura perundang-undangan di bidang perpajakan
3	PENG-3/PJ/2025	22-Oct-25	Implementasi amendments to the common reporting Standar dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai Akses informa keuangan untuk kepentingan perpajakan
4	Permendag Nomor 37 Tahun 2025	22-Oct-25	Perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 16 tah 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor
5	PMK Nomor 72 Tahun 2025	20-Oct-25	Perubahan atas PMK 10 tahun 2025 ttg PPh pasal 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun anggaran 2025
6	PMK Nomor 71 Tahun 2025	15-Oct-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udar Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Lil Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026
7	PMK Nomor 68 Tahun 2025	10-Oct-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
8	PER-18/PJ/2025	24-Sep-25	Tindak lanjut atas data konkret
9	Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 840 Tahun 2025	18-Sep-25	Kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok BPH
10	PP Nomor 40 Tahun 2025	15-Sep-25	Kebijakan energi nasional
11	PER-17/PJ/2025	1-Sep-25	Penetapan tempat terdaftar bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, d Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Besar, Khusus, dan Madya
12	PMK Nomor 62 Tahun 2025	27-Aug-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor
13	PER-9/BC/2025	26-Aug-25	Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No PER-22/BC/2023 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Melalui Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Saran Pengangkut
14	PMK Nomor 61 Tahun 2025	25-Aug-25	Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan hewan khusus terte berupa kuda serta perlengkapan pendukungnya yang ditanggu pemerintah tahun anggaran 2025
15	PMK Nomor 60 Tahun 2025	15-Aug-25	Insentif tambahan PPN atas penyerahan rumah tapak dan satu rumah susun yg ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025
16	Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 722 Tahun 2025	15-Aug-25	Pengurangan pajak barang dan jasa tertentu atas jasa perhote dan makanan dan/atau minuman
17	PER-16/PJ/2025	13-Aug-25	Perubahan atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-6/PJ/2025 tentang pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha ke pajak berisiko rendah, serta Special Purpose Company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak beris rendah
18	PER-15/PJ/2025	5-Aug-25	Batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lai utk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPh a penghasilan yg diterima atau diperoleh pedagang dalam nege dengan mekanisme perdagangan melalui sistem elektronik
19	PMK Nomor 54 Tahun 2025	25-Jul-25	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

20	PMK Nomor 53 Tahun 2025	25-Jul-25	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Ketentuan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajal
21	PMK Nomor 52 Tahun 2025	25-Jul-25	dan Besaran Tertentu Pajak Pertambahan Nilai Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, serta Jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan yang Bahan Seluruhnya Bukan dari Emas, dan/atau Batu Permata dan/atau Batu Lainnya yang Sejenis, yang Dilakukan olel Pabrikan Emas Perhiasan, Pedagang Emas Perhiasan, dan/atau Pengusaha Emas Batangan
22	PMK Nomor 51 Tahun 2025	25-Jul-25	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
23	PMK Nomor 50 Tahun 2025	25-Jul-25	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
24	PMK Nomor 45 Tahun 2025	16-Jul-25	Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Penyerahan di dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Jasa Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis untuk Keperluan Pertahanan dan/atau Keamanan Negara
25	PMK Nomor 44 Tahun 2025	16-Jul-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Bekal Khusus Operasi Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
26	PER-13/PJ/2025	14-Jul-25	Piagam Wajib Pajak
27	PER-8/BC/2025	30-Jun-25	Tata laksana Ekspor barang kiriman
28	Permendag Nomor 17 Tahun 2025	30-Jun-25	Kebijakan dan pengaturan impor tekstil dan produk tekstil
29	Permendag Nomor 16 Tahun 2025	30-Jun-25	Kebijakan dan Pengaturan Impor
30	KEP-116/BC/2025	26-Jun-25	Penerapan secara penuh (mandatory) Ceisa 4.0 tahap keduapuluhsatu
31	PENG-2/PJ/2025	24-Jun-25	Imbauan antigratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2025
32	PENG-29/PJ/2025	20-Jun-25	Waspada penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak
33	23/KM.4/2025	13-Jun-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar
34	PMK Nomor 37 Tahun 2025	11-Jun-25	Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik
35	Perpre Nomor 68 Tahun 2025	5-Jun-25	Sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri
36	PMK Nomor 36 Tahun 2025	4-Jun-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Sekolah yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
37	PMK Nomor 34 Tahun 2025	26-May-25	Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 34 TAHUN 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
38	PER-12/PJ/2025	22-May-25	Batasan kriteria tertentu pihak lain serta penunjukan pihak lain, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daeral pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan
39	PER-11/PJ/2025	22-May-25	Ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan
40	PER-10/PJ/2025	22-May-25	Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional
41	PER-9/PJ/2025	22-May-25	Penonaktifan akses pembuatan faktur pajak dalam rangka penanganan terhadap kegiatan penerbitan dan/atau penggunaar faktur pajak tidak sah

42	PER-8/PJ/2025	21-May-25	Ketentuan pemberian layanan administrasi perpajakan tertentu dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan
43	PER-7/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak, Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan serta Perinciar Jenis, Dokumen, dan Saluran untuk Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
44	PER-6/PJ/2025	21-May-25	Pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan pengusaha kena pajak berisiko rendah serta special purpose company atau kontrak investasi kolektif sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah
45	PMK Nomor 29 Tahun 2025	14-May-25	Pengenaan Bea Masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk Expansible Polystyrene
46	SE-7/PJ/2025	2-May-25	Pemberitahuan berlakunya konvensi multilateral untuk menerapkan tindakan-tindakan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda untuk mencegah penggerusan basis pemajakan dan penggeseran laba untuk persetujuan penghindaran pajak berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Tunisia
47	PER-5/PJ/2025	2-May-25	Penyedia jasa aplikasi perpajakan
48	KEP-73/BC/2025	2-May-25	Penetapan secara [penuh (Mandatory) CEISA 4.0 tahap keduapuluh
49	20/KM.4/2025	30-Apr-25	Penetapan harga ekspor untuk penghitungan Bea Keluar
50	PER-4/PJ/2025	29-Apr-25	Perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor PER- 25/PJ/2020 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan pajak terutang, nota penghitungan, surat ketetapan pajak pajak bumi dan bangunan, surat keputusan kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan, surat pemberitahuan, serta surat tagihan pajak PBB
51	19/KM.4/2025	29-Apr-25	Penundaan pelaksanaan pengawasan ketentuan pembatasan impor dan ekspor berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 18/KM.4/2025 tentang barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
52	18/KM.4/2025	21-Apr-25	Barang yang dibatasi untuk diimpor dan diekspor berdasarkan peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan sebagaimana telah diubah dengan peraturan badan karantina indonesia nomor 5 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan badan karantina indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang jenis komoditas periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan
53	KEP-66/BC/2025	19-Apr-25	Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap kesembilar belas
54	PMK Nomor 27 Tahun 2025	14-Apr-25	Mekanisme Penggantian Pajak Pertambahan Nilai dan Biaya Lain Lain pada Hibah Rumah Sakit Kardiologi Emirat-Indonesia
55	PMK Nomor 25 Tahun 2025	14-Apr-25	Ketentuan Kepabeanan atas Impor Barang Pindahan
56	17/KM.4/2025	14-Apr-25	Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesi Nomor 16/KM.4/2025 Tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar
57	PER-3/PJ/2025	27-Mar-25	Perubahan keempat atas peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-04/PJ/2022 tentang badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah yang ditetapkan sebaga penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto
58	KEP-79/PJ/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh pasal 29 yg terutang dan/atau penyampaian SPI PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024 sehubungan dgn hari libu nasional dan cuti bersama dalam rangka hari suci nyepi dan hari raya idul fitri

59	PENG-23/PJ.09/2025	25-Mar-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan
<u> </u>	PENG-23/FJ.09/2025	23-IVId1-23	pembayaran dan pelaporan SPT PPh Orang Pribadi utk tahun pajak 2024
60	10/KM.4/2025	21-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang Berupa Komoditas Expansible Polystyrene (EPS) dan Nylon Film yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Impor
61	PER-5/BC/2025	14-Mar-25	Perubahan Keenam Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Impor
62	8/KM.4/2025	13-Mar-25	Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/KM.4/2025 tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar
63	4/KM.4/2025	12-Mar-25	Penetapan Jenis Satuan Barang yang Digunakan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor
64	6/KM.4/2025	12-Mar-25	Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
65	PMK Nomor 21 Tahun 2025	6-Mar-25	Pengenaan Bea Masuk antidumping terhadap impor produk nylofilm dari Republik Rakyat Tiongkok, Thailand, dan Taiwan
66 67	PER-4/BC/2025 PENG-20/PJ.09/2025	4-Mar-25 3-Mar-25	Pemberitahuan Pabean Free Trade Zone Kebijakan selama Ramadan 1446 H dan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024
68	PER-3/BC/2025	28-Feb-25	Standar audit kepabeanan dan audit cukai
69	PER-2/BC/2025	28-Feb-25	Tata laksana audit kepabeanan dan audit cukai
70	PENG-19/PJ.09/2025	27-Feb-25	Ralat PENG-18/PJ.09/2025 ttg kebijakan penghapusan sanksi Administratif atas keterlambatan pembayaran dan/atau
71	PMK Nomor 18 Tahun 2025	27-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung Pemerintah tahun anggaran 2025
72	KEP-67/PJ/2025	27-Feb-25	Kebijakan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatar pembayaran dan/atau penyetoran pajak yg terutang dan penyampaian surat pemberitahuan sehubungan dgn implementasi coretax
73	PMK Nomor 17 Tahun 2025	19-Feb-25	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
74	KT No.6/2025	13-Feb-25	Penerbitan faktur pajak
75	KEP-54/PJ/2025	12-Feb-25	Penetapan PKP tertentu
76	PENG-13/PJ.09/2025	12-Feb-25	Pembuatan faktur pajak melalui aplikasi e-faktur client desktop
77	PMK Nomor 15 Tahun 2025	10-Feb-25	Pemeriksaan pajak
78	PMK Nomor 14 Tahun 2025	4-Feb-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik
79	PMK Nomor 13 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
80	PMK Nomor 12 Tahun 2025	4-Feb-25	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Paj yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empa Emisi Karbon Rendah Listrik Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025.
81	PMK Nomor 11 Tahun 2025	4-Feb-25	Ketentuan Nilai Lain sbg DPP dan besaran tertentu PPN
82	PMK Nomor 10 Tahun 2025	4-Feb-25	PPh 21 atas penghasilan tertentu yg ditanggung Pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi tahun 2025
83	KT-05/2025	4-Feb-25	Pembaruan informasi terkini implementasi coretax DJP
84	SE-1/PJ/2025	24-Jan-25	Perlakuan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas komisi reasuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan imbalan jasa keperantaraan yang diterima atau diperoleh perusahaan pialang reasuransi sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usah perasuransian

85	PMK Nomor 9 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Hot Rolled Plate dari Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, dan Ukraina
86	PMK Nomor 8 Tahun 2025	24-Jan-25	Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Wol Terak (Slag Wool) dan Wol Batuan (Rock Wool)
87	PENG-1/PJ/2025	24-Jan-25	Daftar yuridiksi partisipan dan yuridiksi pelaporan dalam rangka pertukaran informasi secara otomatis (automatic exchange of financial account information/AEOI) tahun 2025
88	PMK Nomor 7 Tahun 2025	21-Jan-25	Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah
89	PENG-9/PJ.09/2025	21-Jan-25	Pelaporan SPT Tahunan PPh
90	KEP-24/PJ/2025	15-Jan-25	Penetapan PKP tertentu
91	KT-03/2015	13-Jan-25	Keterangan Tertulis ttg perkembangan coretax DJP
92	PENG - 1/PJ.09/2025	8-Jan-25	Waspada Penipuan Yang Mengatasnamakan Direktur Jenderal Pajak
93	PMK Nomor 4 Tahun 2025	6-Jan-25	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman
94	PER-1/PJ/2025	3-Jan-25	Petunjuk teknis pembuatan faktur pajak dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
95	PMK Nomor 136 Tahun 2024	31-Dec-24	Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
96	PMK Nomor 135 Tahun 2024	31-Dec-24	Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2025
97	PMK Nomor 131 Tahun 2024	31-Dec-24	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean
98	PMK Nomor 119 Tahun 2024	23-Dec-24	Perubahan ketiga PMK 39/PMK.03/2018 ttg tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
99	PMK Nomor 118 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata Cara Pembetulan, Keberatan, Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan di Bidang Perpajakan
100	PMK Nomor 117 Tahun 2024	23-Dec-24	Tata cara penghapusan piutang pajak
101	PMK Nomor 114 Tahun 2024	23-Dec-24	Audit Kepabeanan dan Audit Cukai